

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada dasarnya bertujuan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh melalui proses belajar yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kemampuan guru dan kepala sekolah sebagai garda terdepan pelaksana pembelajaran. Seorang guru dituntut tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang mumpuni. Sementara itu, kepala sekolah diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) yang dapat menggerakkan seluruh sumber daya sekolah secara efektif. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan kompetensi pendidik sebaiknya dirancang secara sistematis, disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, dan didukung oleh evaluasi yang berkelanjutan untuk perbaikan kebijakan itu sendiri (Finney, 2020). Sebuah kebijakan pendidikan yang baik tidak boleh berhenti pada perencanaan semata, melainkan juga harus memastikan bahwa pelaksanaan dan hasilnya sejalan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan (Mahardhani, 2020).

Pemilihan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan kebijakan pengembangan kompetensi yang kompleks dan berlapis. Model CIPP memungkinkan evaluasi dilakukan secara komprehensif, mulai dari menganalisis konteks kebutuhan,

menilai kesiapan input, mengkaji kualitas proses implementasi, hingga melihat capaian produk kebijakan (Rizal et al., 2023). Yusuf dan Matin (2021) menekankan bahwa pendekatan evaluatif dan reflektif seperti ini sangat relevan untuk memastikan kebijakan pengembangan kompetensi benar-benar selaras dengan kebutuhan pendidik dan sekolah. Selain itu, Harmanto dan Yusuf (2020) menunjukkan bahwa model CIPP efektif digunakan sebagai alat pengambilan keputusan kebijakan karena mampu mengungkap hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program pendidikan.

Evaluasi kebijakan pengembangan kompetensi di sekolah binaan YBHP memerlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Penelitian ini dilandasi oleh tiga temuan utama: pertama, adanya kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal dan realitas implementasi di lapangan; kedua, pemanfaatan hasil evaluasi sebelumnya yang belum optimal; dan ketiga, integrasi kebijakan tindak lanjut yang masih perlu penguatan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, model CIPP dipilih sebagai kerangka evaluasi. Pertimbangan pemilihan model ini didasarkan pada relevansinya secara teoretis sekaligus strategis secara praktis, khususnya dalam memetakan secara komprehensif kekuatan dan kelemahan kebijakan yang telah diimplementasikan. Dengan demikian, hasil evaluasi melalui model CIPP diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, kontekstual dengan kondisi lokal, serta berkelanjutan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama terkait kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA. Permasalahan ini timbul akibat ketidaksesuaian antara kondisi ideal pengembangan kompetensi dan realitas di lapangan. Identifikasi permasalahan ini diperlukan untuk memfokuskan penelitian serta mencegah pembahasan yang terlalu luas. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah belum sepenuhnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan riil (needs assessment) pendidik dan sekolah. Program yang ada cenderung bersifat umum dan seragam, sehingga belum mampu menjawab perbedaan tingkat kompetensi masing-masing guru maupun kepala sekolah.
2. Hasil evaluasi dan asesmen kompetensi belum terintegrasi secara terencana dalam penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi. Data hasil asesmen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan program, penentuan prioritas pelatihan, maupun penyusunan kebijakan tindak lanjut.
3. Dampak kebijakan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah belum optimal dan merata di semua sekolah binaan. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan akses

terhadap pelatihan dan pendampingan, serta tindak lanjut pasca-pelatihan yang masih terbatas.

4. Pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi pendidik masih didominasi oleh pendekatan berbasis proses, sementara aspek konteks dan kesiapan input belum diakomodasi secara memadai, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini berjalan secara fokus dan mendalam, diperlukan penetapan batasan penelitian yang jelas. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan menjaga kesesuaian kajian dengan tujuan penelitian.

1. Subjek penelitian meliputi guru dan kepala sekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA, serta pengelola yayasan dan asesor yang berperan dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.
2. Lokasi penelitian hanya mencakup sekolah-sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA yang berada di wilayah Kalimantan Tengah.
3. Waktu penelitian dibatasi pada periode pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi, sesuai dengan ketersediaan data dan dokumen pada saat penelitian dilakukan.

4. Fokus kajian diarahkan pada evaluasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah menggunakan model CIPP yang mencakup aspek konteks, input, proses, dan produk.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana konteks (context) kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA?
2. Bagaimana kesiapan dan dukungan input kebijakan dalam pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah pada sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA?
3. Bagaimana proses (process) implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA?
4. Bagaimana hasil (product) kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun secara langsung untuk menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi konteks kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA.

2. Untuk menganalisis input kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA.
3. Untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA.
4. Untuk mengevaluasi hasil (produk) kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati PAMA.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis, praktis, maupun bagi pengambilan kebijakan.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan kajian evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam penerapan model CIPP untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi empiris mengenai evaluasi kebijakan di lembaga pendidikan berbasis yayasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan masukan bagi pengelola Yayasan Bina Harati PAMA dalam merancang,

melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pengembangan kompetensi secara lebih sistematis dan berbasis kebutuhan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu guru dan kepala sekolah dalam memahami posisi serta peran mereka dalam kebijakan yang sedang berjalan.

3. Manfaat Kebijakan

Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis data. Rekomendasi ini disusun untuk mendukung pengambil kebijakan di lingkungan yayasan dan pemangku kepentingan pendidikan terkait dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan pendidikan yang lebih efektif.

